



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 dengan baik untuk mewujudkan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dalam hal ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dan berperan mewujudkan sasaran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati di awal tahun anggaran, dan telah diubah dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Selain itu, dokumen ini disusun guna memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi informasi tentang perencanaan kinerja yang tertuang dalam beberapa dokumen, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta mengemukakan juga permasalahan, upaya pemecahan dan saran. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan, utamanya bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka meningkatkan kinerja ke depan.

Kami menyadari, bahwa masih banyak kekurangan pada akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, baik dari aspek kinerja maupun penyajian laporan ini, oleh karena itu kami berharap adanya masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya.

Boyolali, Pebruari 2023

KERALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI,



DARMADI, S.H.

Pembina

NIP. 19671120 198903 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
2.1. Perencanaan Strategis Organisasi	7
2.2. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Analisa Capaian Kinerja.....	14
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	32
4.1. Simpulan.....	32
4.2. Saran.....	32
4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	4
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang..	4
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural	5
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022	10
Tabel 3.1.	Pencapaian Kinerja Sasaran	14
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Sasaran 1	15
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1	15
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD	15
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional	15
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	17
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2	17
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD	17
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional	18
Tabel 3.10.	Pencapaian Kinerja Sasaran 3	21
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3	21
Tabel 3.12.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Periode RPJMD	21
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Nasional	21
Tabel 3.14.	Pencapaian Kinerja Sasaran 4	24
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4	24
Tabel 3.16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Akhir Periode RPJMD	24
Tabel 3.17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Realisasi Nasional	24
Tabel 3.18.	Pencapaian Kinerja Sasaran 5	26
Tabel 3.19.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5	26

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Akhir Periode RPJMD	26
Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Realisasi Nasional	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Perkembangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	16
Grafik 3.2.	Perkembangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	18
Grafik 3.3.	Perkembangan Indeks Harga Konsumen	22
Grafik 3.4.	Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Agro Industri Susu	25
Grafik 3.5.	Perkembangan Nilai SAKIP	27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Visi Bupati Boyolali adalah “Boyolali Maju, meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)). Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian melaksanakan visi Bupati Boyolali melalui Misi kesatu yaitu “Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan” dan Misi ketiga yaitu “Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional” dengan sasaran dan IKU yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan Misi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali melaksanakan sejumlah 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.311.243.000,00.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan adalah sangat tinggi. Keberhasilan ini disumbangkan oleh 5 (lima) sasaran yang berhasil mencapai nilai kinerja 91% keatas dengan kategori sangat tinggi. Berikut Capaian Kinerja per Sasaran :

1. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian” dengan rata-rata capaian kinerjanya 114,43 %.
2. Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian” dengan rata-rata capaian kinerjanya 433 %.
3. Sasaran “Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa” dengan rata-rata capaian kinerjanya 104,51 %.
4. Sasaran “Meningkatnya agro industri susu” dengan rata-rata capaian kinerjanya 102 %.
5. Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan rata-rata capaian kinerjanya 100,74 %.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari 5 (lima) indikator kinerja utama sebesar 170,94 % (kategori sangat tinggi). Sedangkan pembiayaan dari APBD Tahun 2022 termasuk belanja pegawai adalah sebesar Rp. 26.311.243.000,00 terealisasi Rp. 23.842.982.759,00 atau 90,62 %.

Dalam rangka mencapai kinerja tersebut terdapat tantangan/hambatan dan peluang/faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Tantangan/Hambatan
 - Belum adanya Gedung Kantor Laboratorium Kemetrolagian yang representatif.
 - Diperlukan tambahan SDM 2 orang Fungsional Penera Trampil.
 - Kurangnya ketersediaan anggaran (untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi terkait Tera, Tera Ulang dan Pengawasan).
 - Perubahan harga barang di tingkat konsumen dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan rantai pasok serta stok.
 - Belum semua petani mendapatkan sarana kartu tani untuk penebusan pupuk.
 - Alokasi pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan petani yang sebenarnya.

2. Peluang/ Faktor Pendukung

- Tersedianya alat standar yang dimiliki UPT Metrologi Legal Disdagperin Kabupaten Boyolali.
- Tertelusunya alat standar yang dimiliki UPT Metrologi Legal Disdagperin Kabupaten Boyolali.
- Sudah ada SDM Fungsional Penera/Tenaga Berhak dan Pengawas Kemetrolgian (2 orang Penera dan 1 orang Pengawas Kemetrolgian).
- Koordinasi dengan pedagang bahan kebutuhan pokok, petugas penginput informasi harga pada aplikasi komoditas.
- Koordinasi yang baik dengan pelaku usaha (Kios Pupuk Lengkap)/ Distributor pupuk bersubsidi antar instansi terkait dalam pembinaan distribusi dari lini 3 dan lini 4.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, Perangkat Daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP Perangkat Daerah antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 100 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026.

1.2. Gambaran Organisasi

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan pasar;
2. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan pasar;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan, perindustrian dan pengelolaan pasar;
4. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Bidang Usaha Perdagangan;
4. Bidang Bidang Pendapatan;
5. Bidang Infrastruktur, Pembinaan, dan Penataan Pedagang;
6. Bidang Perindustrian;

7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPT.

Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali merupakan subyek dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Berikut gambaran kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan Golongan ruang dan jabatan.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

Jenis Pendidikan							Jumlah
	PNS (Non Fungsional)	Fungsional	PPPK	PTT	THL	lainnya	
S3	-	-	-	-	-	-	-
S2	7	1	-	-	-	-	8
S1/D4	29	6	-	-	11	-	46
D1-D3	5	1	-	-	5	-	11
SMA	42	-	-	-	57	-	99
SMP	7	-	-	-	14	-	21
SD	3	-	-	-	7	-	10
Jumlah	93	8	-	-	94	-	195

Sumber: *Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022*

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
3	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-
4	Pembina	IV/a	6	3
5	Penata Tingkat I	III/d	11	9

6	Penata	III/c	4	1
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	23	1
8	Penata Muda	III/a	1	2
9	Pengatur Tingkat I	II/d	25	1
10	Pengatur	II/c	2	-
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	5	-
12	Pengatur Muda	II/a	2	-
13	Juru Tingkat I	I/d	2	-
14	Juru	I/c	1	-
15	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-
16	Juru Muda	I/a	-	-
Total			84	17

Sumber: *Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022*

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon 2)	1	-
2	Jabatan Administrator (Eselon 3)	4	1
3	Jabatan Pengawas (Eselon 4)	24	6
4	Jabatan Pelaksana (Staf)	51	3
5	Jabatan Fungsional	4	7
	Jumlah	84	17

Sumber: *Subbagian Umum Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022*

Aspek-aspek strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pemasaran barang
2. Peningkatan kelancaran distribusi barang
3. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

4. Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Olahan Susu
5. Pengembangan Industri Sektor Susu
6. Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi

Visi dan misi Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali 2021-2026, sebagai berikut :

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2021–2026) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” (Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)).

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Boyolali, telah menetapkan 5 Misi sebagai berikut:

- 1) Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
- 2) Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
- 3) Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
- 4) Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
- 5) Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Dari ke lima misi tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung Misi Kesatu “Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan” dan Misi ketiga yaitu “Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional”.

Fokus pelaksanaan misi tersebut pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali adalah:

1. Peningkatan kapasitas pemasaran barang;
2. Peningkatan kelancaran distribusi barang;
3. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM);
4. Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Olahan Susu;
5. Pengembangan Industri Sektor Susu;
6. Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 mempunyai tujuan dengan sasaran sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi metode pemasaran barang 2. Peningkatan fasilitasi Perijinan Pengembangan Usaha 3. Peningkatan promosi produk potensial ekspor 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan stok barang pokok 2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	1. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM 2. Peningkatan akses permodalan 3. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna 4. Penerapan metode produksi berorientasi bisnis
Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya agro industri susu	Peningkatan Kapasitas Pemasaran Produk Olahan Susu	1. Peningkatan promosi produk olahan susu 2. Fasilitasi pemasaran produk olahan susu
		Pengembangan Industri Sektor Susu	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu 2. Peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	3. Peningkatan fasilitasi perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP

Semua sasaran dengan indikator sejumlah 5 (lima) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program sejumlah 8 (delapan) dan kegiatan sejumlah 17 (tujuh belas) Keseluruhan penjabaran tersebut tertuang dalam cascading IKU sebagaimana terlampir.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Indikator Kinerja Utama serta dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian;
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian;

3. Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa;
4. Meningkatnya agro industri susu;
5. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Boyolali Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KOORDINATOR
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	3,88 %	Bidang Industri
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1 %	Bidang Usaha Perdagangan
3	Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen	109,89	Bidang Usaha Perdagangan
4	Meningkatnya agro industri susu	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	2 %	Bidang Usaha Perdagangan
5	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	81,3 %	sekretariat

Sumber: *Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022*

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.311.243.000,00, yang selengkapnya sebagaimana dokumen

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Boyolali Tahun 2022 (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi dari target baik secara kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021.

- 1) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan;
- 2) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada

dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun Anggaran 2022. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

No	Capaian kinerja	Kategori
1.	91 % keatas	Sangat tinggi
2	76 – 90 %	Tinggi
3	66 – 75 %	Sedang
4	51 – 65 %	Rendah
5	50 % kebawah	Sangat rendah

Pengukuran kinerja disajikan dengan membandingkan antara **target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode RPJMD, dan apabila memungkinkan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja secara nasional.** Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran/ Indikator	Target Akhir Periode RPJMD	Target 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi 2022	Realisasi Nasional
Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian						
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	8,00 %	3,88 %	5,50 %	4,44 %	4,75 %
Sasaran 2: Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian						
2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5 %	1 %	8,61 %	4,33 %	5,32 %
Sasaran 3: Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa						
3	Indeks Harga Konsumen	120,39	109,89	107,31	114,85	113,59
Sasaran 4: Meningkatnya agro industri susu						
4	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	4 %	2 %	-	2,04 %	-
Sasaran 5: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
5	Nilai SAKIP	82,20%	81,30%	81,72%	81,90%	85,25%
	Total					

3.2. Analisa Capaian Kinerja

Berdasar Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) Indikator sebagai indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

- 1) **Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian.**

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	3,88 %	4,44 %	114.43 %

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	
		2021	2022
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	3,88%	5,50%	4,44 %

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	8,00%	4,44 %	42,30 %

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	4,44 %	4,75 %	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 114,43 % dari target sebesar 3,88 % terealisasi sebesar 4,44 %.

Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 20 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 5,50 %.

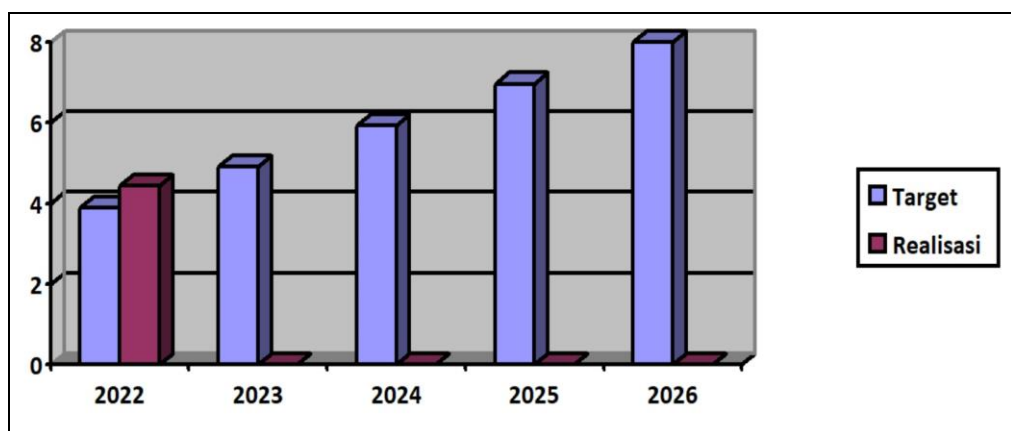
Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasi sampai dengan tahun 2022 mengalami progres sebesar 42,30 %

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih buruk yaitu sebesar 0,45 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 4,89 %.

Perkembangan Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri dari tahun ke tahun diharapkan mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1. Perkembangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri adalah sebagai berikut:

1. ketersediaan narasumber, adanya peserta, adanya materi, adanya sarana dan prasarana;
2. anggaran yang mencukupi.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut: -

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:-

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	630 IKM	740 IKM	117,46 %

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 3.661.057.000,00 dan terealisasi Rp 2.781.127.682,00 dengan capaian 75,97 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa bangunan, kendaraan, komputer dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

2) Sasaran 2. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian

Tabel 3.6.

Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1 %	4,33 %	433 %

Tabel 3.7.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	
		2021	2022
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1 %	8,61 %	4,33 %

Tabel 3.8.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	5 %	4,33 %	92,32 %

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,33 %	5,32 %	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 4,33 % dari target sebesar 1 % terealisasi sebesar 433 %.

Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 50 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 8,61 %.

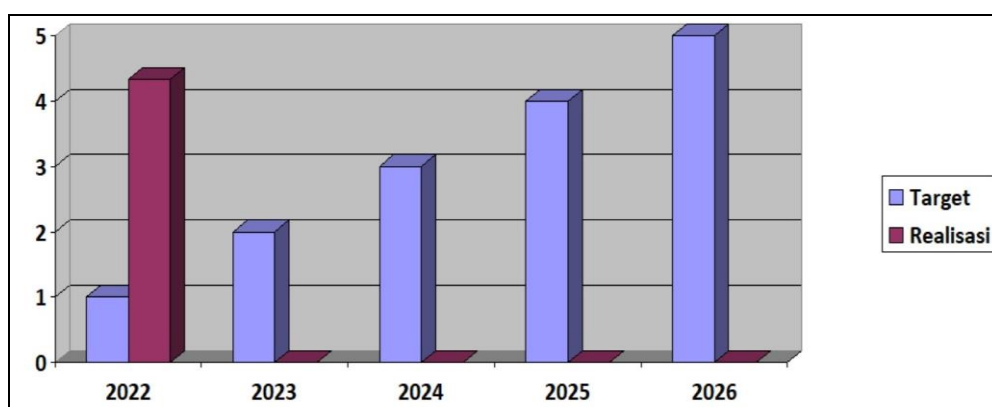
Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasi samapai dengan tahun 2022 mengalami progres sebesar 92,32 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih buruk yaitu sebesar 1,19 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 5,32%.

Perkembangan Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dari tahun ke tahun diharapkan mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2. Perkembangan Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

1. anggaran mencukupi;

2. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas dan pelaku usaha ekspor;
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara provinsi dan dinas;
4. Tersedianya alat standar yang dimiliki UPT Metrologi Legal Disdagperin Kabupaten Boyolali;
5. Tertelusunya alat standar yang dimiliki UPT Metrologi Legal Disdagperin Kabupaten Boyolali;
6. Sudah ada SDM Fungsional Penera/Tenaga Berhak dan Pengawas Kemetrolgian (2 orang Penera dan 1 orang Pengawas Kemetrolgian).

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) masih rendahnya pelaku usaha dalam pemahaman pentingnya promosi produk;
- 2) Belum adanya Gedung Kantor Laboratorium Kemetrolgian yang representatif;
- 3) Diperlukan tambahan SDM 2 orang Fungsional Penera Trampil;
- 4) Kurangnya ketersediaan anggaran (untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi terkait Tera, Tera Ulang dan Pengawasan).

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) fasilitasi melalui bimtek pemasaran berkelanjutan;
- 2) Tersedianya Gedung Kantor Laboratorium Kemetrolgian yang representatif;
- 3) Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional Pengawasan Kemetrolgian;
- 4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi terkait Tera, Tera Ulang dan Pengawasan dalam rangka mewujudkan masyarakat Boyolali yang tertib ukur.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI / Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
	- Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100 %
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN/ Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	6	8	133,33 %
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kab/Kota.			
	- Pemeran Dagang Nasional	1 th	1 th	100 %
	- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	40 pelaku usaha	34 pelaku usaha	85 %
	- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100 %
3.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
	- Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang	13.033 UTTP	29.536 UTTP	226,62 %

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 458.357.000,00 dan terealisasi Rp 429.884.100,00 dengan capaian 93,79 %. Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa bangunan, kendaraan, komputer dan

lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3) Sasaran 3. Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa

Tabel 3.10.

Pencapaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Indeks Harga Konsumen	109,89	114,85	104,51 %

Tabel 3.11.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	
		2021	2022
Indeks Harga Konsumen	109,89	107,31	114,85

Tabel 3.12.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Indeks Harga Konsumen	120,39	114,85	62,90 %

Tabel 3.13.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
Indeks Harga Konsumen	114,85	113,59	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,51 % dari target sebesar 109,89 terealisasi sebesar 114,85.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 107,03 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 107,31.

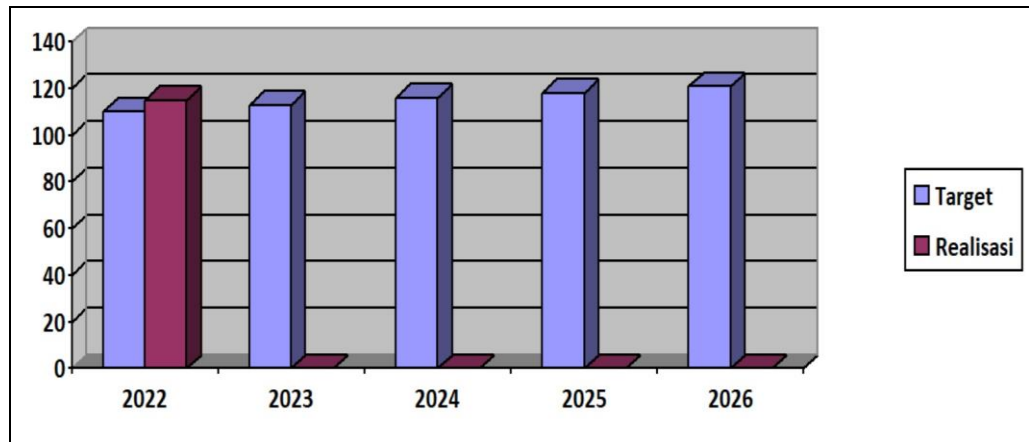
Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka 120,89 mengalami progres sebesar 62,90 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi secara nasional maka Kabupaten Boyolali lebih buruk yaitu sebesar 1,26 dalam hal ini realisasi nasional sebesar 113,59.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen dari tahun ke tahun diharapkan mengalami penurunan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Indeks Harga Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaku usaha yang bersedia menyediakan barang untuk pasar murah dengan harga yang bersaing;
2. Koordinasi dengan pedagang bahan kebutuhan pokok, petugas penginput informasi harga pada aplikasi komoditas;
3. Dukungan anggaran yang tersedia;
4. Sarana dan Prasarana yang tersedia;
5. SDM yang cukup.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan harga barang di tingkat konsumen dipengaruhi oleh mekanisme pasar dan rantai pasok serta stok;
- 2) Waktu yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik dan non fisik berdampak pada banyaknya realisasi/pencairan yang terlaksana di akhir tahun;

- 3) Pembayaran non fisik tidak bisa terealisasi sepenuhnya karena terkendala dengan syarat kelengkapan belum ada, waktu pemrosesan di BPN yang tidak mencukupi.

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara:

- 1) Perlu adanya koordinasi dengan pelaku usaha bapak serta informasi stok di tingkat distributor;
- 2) Mengoptimalkan ketersediaan waktu yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kontrak;
- 3) Mengoptimalkan kelengkapan fasilitas dukungan sarana dan prasarana pasar rakyat guna memenuhi syarat pencapaian SNI Pasar Rakyat;
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan kelengkapan bukti-bukti dukung dalam kelengkapan proses pensertifikatan tanah.

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Indeks Harga Konsumen, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING/ Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	10,48	87,33 %
	- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam Satu Kabupaten/Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %
2.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING/ Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota			
	- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	52 kali	52 kali	100 %

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa bangunan, kendaraan, komputer dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

4) Sasaran 4. Meningkatnya agro industri susu

Tabel 3.14.

Pencapaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	2 %	2,04 %	102 %

Tabel 3.15.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	
		2021	2022
Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	2 %	0 %	2,04 %

Tabel 3.16.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	4 %	2,04 %	51 %

Tabel 3.17.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 dengan Realisasi Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	2,04 %	-	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 102% % dari target sebesar 2 % terealisasi sebesar 2,04 %.

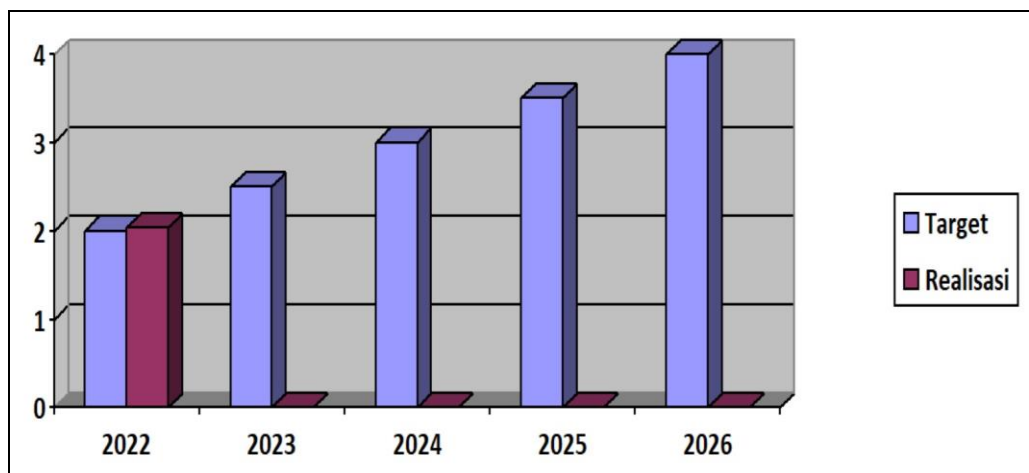
Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 100 %, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 0 %.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka sampai dengan tahun 2022 mengalami progres sebesar 51 %.

Perkembangan Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu dari tahun ke tahun diharapkan mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.4. Perkembangan Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Agro Industri Susu



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu adalah sebagai berikut:

1. anggaran yang mencukupi

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut: -

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara: -

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Persentase Peningkatan Pendapatan Sektor Agro Industri Susu, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	20 IKM	30 IKM	150 %

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 127.353.600,00 dan terealisasi Rp 121.357.815,00 dengan capaian 95,29 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana prasarana pendukung kinerja berupa bangunan, kendaraan, komputer dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

5) Sasaran 5. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 3.18.

Pencapaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Nilai SAKIP	81,30%	81,90%	100,74%

Tabel 3.19.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	
		2021	2022
Nilai SAKIP	81,30%	81,72%	81,90%

Tabel 3.20.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Periode RPJMD 2026	Realisasi sampai dengan 2022	Progres
Nilai SAKIP	82,20%	81,90%	72,48%

Tabel 3.21.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 dengan Realisasi Kabupaten

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Kabupaten	Keterangan
Nilai SAKIP	81,90%	85,25%	SAKIP Setda

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,74% dari target sebesar 81,30% terealisasi sebesar 81,90%.

Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 100,22%, dimana realisasi tahun 2021 adalah sebesar 81,72%.

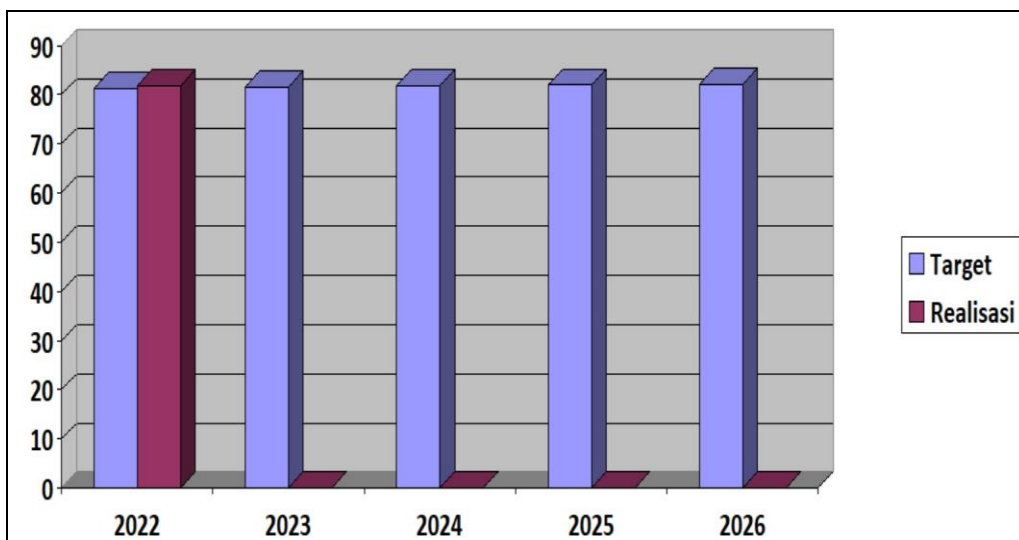
Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD maka realisasi sampai dengan tahun 2022 mengalami progres sebesar 72,48%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi secara kabupaten maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali lebih buruk yaitu sebesar 3,35% dalam hal ini realisasi kabupaten sebesar 85,25%.

Perkembangan nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.5. Perkembangan Nilai SAKIP



Unsur-unsur yang berperan dalam pencapaian target nilai SAKIP adalah sebagai berikut: adanya anggaran yang mencukupi.

Adapun kendala atau hambatan yang ditemui dalam pencapaian target adalah sebagai berikut: -

Atas hambatan tersebut telah dilakukan upaya mengatasinya dengan cara: -

Dalam rangka upaya pencapaian target kinerja utama Nilai SAKIP, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100 %
	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 buah	2 buah	100 %
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	100 persen	100 %
	- Penyediaan peralatan rumah tangga	100 persen	100 persen	100 %
	- Penyediaan bahan logistik kantor	100 persen	100 persen	100 %
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	100 persen	100 %
	- Penyediaan bahan / Material	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Fasilitasi kunjungan tamu	1 tahun	1 tahun	100 %
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100 %
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	100 %
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 persen	100 persen	100 %
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 persen	100 persen	100 %
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	100 %
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	100 %	100 %	100 %
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	100 %
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	15 dokumen	100 %
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100 %
7.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.307.180.000,00	6.351.723.733,00	100,7 %
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100 %

Dari sisi pembiayaan disediakan anggaran sebesar Rp 15.805.246.000,00 dan terealisasi Rp 15.319.821.127,00 dengan capaian 96,93 %.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan melakukan pembinaan serta peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun melalui keikutsertaan diklat teknis. Demikian juga dengan penggunaan sarana

prasarana pendukung kinerja berupa bangunan, kendaraan, komputer dan lain-lain telah memenuhi dan mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 23.842.982.759,00 atau 90,62 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 26.311.243.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.468.260.241,00 atau 9,38 %. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian/ PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI / Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	21.832.000	19.721.600	90
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian/ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/ Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kab/Kota.	405.000.000,00	380.740.000	94
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian/ PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN/ Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	31.525.000,00	29.422.500,00	93
4	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa/ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN/ Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.386.583.000	5.312.149.850	83
5	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian/ PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.661.057.000,00	2.781.127.682,00	76
6	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.522.744.000,00	13.326.628.379,00	98,55
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.220.849.000,00	1.034.621.097,00	84,75

8	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.900.000,00	150.627.000,00	99
9	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.662.000,00	233.253.033,00	84,62
10	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perangkat daerah/ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	633.091.000,00	549.696.518,00	86,83
TOTAL		26.311.243.000,00	23.842.982.759,00	90,62

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali masuk dalam kategori sangat tinggi. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran:

Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian.” capaian kinerja 114.43 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian” capaian kinerja 433 % dalam kategori Sangat Tinggi meliputi 3 (tiga) indikator.

Sasaran “Meningkatnya Stabilitas harga barang dan jasa” capaian kinerja 104,51 % dalam kategori sangat tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

Sasaran “Meningkatnya agro industri susu” capaian kinerja 102 % dalam kategori sangat tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” capaian kinerja 100,74% dalam kategori sangat tinggi meliputi 1 (satu) indikator.

4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/ kegiatan dalam mencapai target kinerja, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- a. Perlu adanya Gedung Kantor Laboratorium Kemetrolagian yang representatif.

- b. Diperlukan tambahan SDM 2 orang Fungsional Penera Trampil.
- c. Perlunya anggaran untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi terkait Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.

4.3. Tindak Lanjut atas Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2021, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali telah melaksanakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Menyusun SOP tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja;
- b. Menyusun SOP tentang Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan;
- c. Menyusun Laporan Kinerja yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.

Boyolali, Pebruari 2023

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BOYOLALI,



DARMADI, S.H.

NIP. 19671120 198903 1 007

LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 2021-2026;
2. Cascade down IKU Perangkat Daerah 2021-2026;
3. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Tahun 2022;
4. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022;
6. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022;
7. Laporan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
8. Piagam Penghargaan Tahun 2022; dan
9. Lain-lain yang dianggap perlu.